BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasalkan hasil penelitian dan analisis yang Peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Implementasi netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada, baik dari perspektif hukum maupun etika, bertujuan untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan kredibel. Secara hukum, netralitas ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang aparat kepolisian terlibat dalam politik praktis dan memihak pada kandidat tertentu. Secara etika, netralitas menuntut aparat kepolisian untuk bertindak profesional, tidak memihak, dan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang pilihan politik mereka. Implementasi netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada merupakan hal yang krusial untuk menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Secara hukum, netralitas ditegakkan melalui peraturan perundang-undangan yang melarang keterlibatan dalam politik praktis. Secara etika, netralitas menuntut profesionalisme, tidak memihak, dan integritas dalam menjalankan tugas. Penegakan hukum yang tegas dan pendidikan etika yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan aparat kepolisian benar-benar menjaga netralitasnya dalam Pilkada dan pemilu lainnya.

2. Netralitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) adalah prasyarat penting bagi integritas dan keberhasilan proses demokratis di Indonesia. Dalam konteks ini, netralitas Polri mencerminkan kemampuannya untuk menjalankan tugas negara tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Polri memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan selama Pemilu, termasuk pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan maka Peneliti akan memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk kedepannya :

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum dengan Perluasan cakupan regulasi, Memperjelas batasan-batasan tindakan yang dianggap melanggar netralitas, termasuk larangan terlibat dalam kegiatan politik praktis, menjadi tim sukses, atau menunjukkan keberpihakan. Peningkatan efektivitas penegakan hukum Memastikan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar netralitas, mulai dari teguran hingga pemecatan, dilaksanakan secara konsisten dan adil.
2. Berdasarkan ketidaknetralan ini berdampak pada implikasi utama dari ketidaknetralan aparat kepolisian terhadap demokrasi yaitu dapat Melemahkan Kepercayaan Publik.Ketidaknetralan aparat kepolisian,

seperti terlihat dalam kasus-kasus keberpihakan pada satu kelompok politik atau individu tertentu, dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Penguatan Kode Etik Polri perlu terus memperkuat implementasi kode etik internal yang menegaskan pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas-tugas pemilu. Institusi Polri harus melakukan peningkatan kapasitas personel memberikan pelatihan khusus kepada personel Polri untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang netralitas dan menghadapi tantangan politik dengan lebih efektif.